BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah suatu fenomena yang dapat mendorong perkembangan pasar bergerak sangat kompetitif dan berdampak pada persaingan bisnis yang semakin kompleks, hal ini jelas memberikan tantangan baru bagi manajemen. Dalam usaha untuk mengatasi masalah globalisasi tersebut perusahaan-perusahaan mulai menyusun kekuatan untuk meraih apa yang dinamakan keunggulan kompetitif.

Mayoritas perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan keluarga. Menurut data *Indonesian Institute for Corporate and Directorship* (IICD, 2010), lebih dari 95 persen bisnis di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki maupun dikendalikan oleh keluarga. Perusahaan-perusahaan keluarga tersebut banyak memberikan kontribusi bagi negara. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, perusahaan keluarga di Indonesia merupakan perusahaan swasta yang mempunyai kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto yaitu mencapai 82,44%. (Swara Karya, 28 Juni 2007).

Usaha mikro, kecil, menengah atau yang biasa disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Terdapat beberapa stigma yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga sering tidak professional, tidak bisa memisahkan kepentingan keluarga dan kepentingan bisnis, lebih mengutamakan hubungan keluarga daripada kinerja, dan memiliki sistem pengendalian yang tidak terkontrol. Namun eksistensi perusahaan keluarga selalu mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini bisa jadi disebabkan karena kebanyakan perusahaan keluarga lebih mementingkan hubungan antar keluarga dalam perusahaan dan memilih untuk menjalankan perusahaan secara luwes dibandingkan dengan menerapkan sistem pengendalian yang professional seperti perusahaan publik akan tetapi tidak menimbulkan hubungan yang nyaman antara karyawan seperti pada perusahaan keluarga.

Keluwesan dalam penerapan pengendalian ini umumnya mendorong para karyawan memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Menurut Purnama (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dan sistem pengendalian memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas karyawan pada perusahaan kelurga, hal ini tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai prinsip oleh pimpinan. Secara tidak langsung karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan mendorong peningkatan kerja karyawan. Saat kerja karyawan meningkat hal ini bisa jadi sebagai indikator bahwa kinerja manajemen sudah sangat efektif dan efisien.

Secara teori, dalam perusahaan publik kinerja manajemen akan menjadi lebih baik apabila setiap aspek dikendaliakan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir tindak kecurangan ataupun kegagalan dalam proses operasional sehingga celah perusahaan untuk mengalami kerugianpun semakin sedikit. Berbeda dengan perusahaan keluarga yang lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dalam bekerja, sehingga cenderung lebih memilih menjalin hubungan baik diantara para karyawan.

Penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik dalam suatu perusahaan akan menghasilkan dampak positif untuk perkembangan usaha. Akan tetapi, dalam perusahaan keluarga seringkali sistem pengendalian manajemem dikesampingkan tapi perusahaan tetap mengalami perkembangan usaha yang cukup signifikan. Seperti yang terjadi dalam usaha keluarga warung makan Sari Laut Mbak Nur yang berlokasi di Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariyana, Wiyono (2013) menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seseorang. Selain itu, hasil penelitian dari Dewantoro menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kekuatan keluarga terhadap kinerja perusahaan. Berdasrkan pemaparan masalah di atas maka dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem pengendalian manajemen yang

diterapkan pada perusahaa keluarga yaitu UD.X sehingga dapat mempengaruhi kinerja manajemen.

Sari laut Mba Nur merupakan salah satu UMKM yang ada di Kota Parepare, Sari Laut Mba Nur merupakan usaha warung makan yang menyediakan berbagai menu makanan khas warung Sari Laut antara lain seafood dan sayur serta berbagai jenis minuman.

Sari Laut Mba Nur berdiri pada tahun 2017 di Kota Parepare yang dipelopori oleh pemilik usaha yaitu Nur Lia yang kemudian nama tersebut menjadi nama usaha warung makan yang dikenal dengan nama Sari Laut Mba Nur yang melayani perdagangan makanan untuk menu makanan seafood.

Berdasarkan observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada warung Sari Laut Mbak Nur diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan operasional warung pemilik tidak mengenal istilah sistem manajemen namun hanya menggunakan sistem kekeluargaan dengan pembagian tugas secara sederhana dimana terdapat karyawan yang bertugas melayani pengunjung, menerima pembayaran hingga bagian dapur.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa warung Sari Laut Mbak Nur yang berlokasi di Kota Parepare masih menggunakan sistem manajemen yang sederhana sehingga penting untuk dilakukan penelitian sehingga dapat dianalisis dan diketahui pentingnya sistem

pengendalian manajemen pada warung Sari Laut Mbak Nur di Parepare.

Berdasarkan latar blakang diatas maka penulis tertarik meneliti dengan judul “Pentingnya Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare”.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka adapun tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui pentingnya penerapan sistem pengendalian manajemen pada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

   Semoga hasil penelitia ini dapat menjadi sumber kajian bagi perusahaan-perusahaan berjenis usaha mikro dalam hal pengendalian manajemen sehingga dapat meningkatkan operasional perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen yang baik.

2. Manfaat Praktis

Semoga hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi semua pihak khususnya bagi pemilik usaha warung Sari Laut Mbak Nur yang berlokasi di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia, UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki *profit* atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan.

Definisi UMKM menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud adalah :

a. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan memenuhi kriteria, sebagai berikut : 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

b. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produkrtif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain itu juga harus memiliki kriteria sebagai berikut : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni : 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

2. Tujuan dan Manfaat UMKM

Menurut Fandy Tjiptono (2008), UMKM memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian nasional dan perlu di tingkatkan dalam pemberdayaannya. Adapaun tujuan pemberdayaan UMKM yang telah tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu a) Mewujudakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. c) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Selain itu juga peran UMKM adalah sebagai penyedia barang dan jasa, penyerap tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah bagi produk daerah, peningkatan taraf hidup. Melihat perannya yang begitu besar maka pembinaan dan pengembangan industri kecil bukan saja penting sebagai jalur ke rah pemerataan hasil-hasil pembangunan tetapi juga unsur pokok dari struktur industri Indonesia.

3. Peran UMKM

Menurut Nugroho (2003), sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Beberapa kesimpulan, setidak-tidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM ternyata tak bisa diabaikan.

Abdullah Maskur (2005), berpendapat bahwa negara-negara berkembang yang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbhan ekonomi. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memainkan peran-peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di Negara-negara maju (NM). Di NM, UMKM sangat penting tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar.

Di NSB, khususnya Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Serta

pembangunan ekonomi pedesaan. Dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Ekspor Non-Migas, khususnya produk-produk manufaktur, dan inovasi serta pengembangan teknologi, peran UMKM di NSB relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang paling mencolok dengan UMKM di NM.

4. Perkembangan UMKM

Nugroho (2003), mengatakan bahwa menurut database dari Menteri Negara Koperasi dan UKM (Menegkop & UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1997, terdapat sekitar 39,7 juta usaha mikro kecil (UMK), dengan nilai penjualan rata-rata pertahun kurang dari Rp 1 Miliar per unit, atau sekitar 99,8% dari total unit usaha pada tahun itu. Pada tahun 1998, pada saat krisis ekonomi mencapai titik terburuknya dengan dampak negative yang sangat besar terhadap hampir semua sector ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan dari berbagai skala usaha mengalami kebangkrutan atau mengurangi volume kegiatan secara drastis.

Pada saat itu Menegkop & UKIM memperkirakan hampir 3 juta UMK berhenti berusaha, dan jumlah usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) yang tutup usaha, masing-masing sekitar 12,7% dan 14,2% dari jumlah unit masing-masing kelompok.

Lebih lanjut Nugroho (2003), pada tahun 2000, saat ekonomi Indonesia mulai pulih dari krisis ekonomi 1997/1998, tercatat ada

sekitar 39,7 juta UMK, atau 99,85% dari jumlah perusahaan dari jumlah perusahaan berbagai skala di Indonesia. Pada tahun yang sama, ada sekitar 78,8 juta UM, dengan rata-rata nilai penjualan per tahun berkisar lebihy dari Rp 1 juta dan kurang dari Rp 50 miliar, atau 0,14% dari semua usaha yang ada.

Pada tahun 2005, jumlah UMK tercatat sekitar 47 juta, sedangkan jumlah UM mencapai hampir 96 juta unit. Pada tahun 2006, jumlah UMK mencapai sekitar 99,77% dari jumlah usaha yang ada di Indonesia, sedangkan jumlah UM dan UB, masing-masing 0,01 dan 0,22%. Namu demikian, laju pertumbuhan unit usaha dari kelompok UM jauh lebih tinggi dibandingkan dengan UMK. Pada tahun 2008, jumlah populasi UMK dan UM (sebut saja UMKM) mencapai sekitar 52,3 juta unit dan bertambah lagi menjadi 52,7 juta unit pada tahun 2009, atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia yang berjumlah 52,769 juta unit usaha.

Kesempatan kerja yang diciptakan oleh UMKM pada tahun 2006 adalah sebanyak 80.933.384 orang atau 91,14% dari jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jumlah ini meningkat dari 70.282.178 orang pada tahun 2003, atau laju pertumbuhan sebesar 15,15%. Sedangkan UM dan UB, masing-masing 4.483.109 dan 3.388.462 orang. Jumlah pekerja di UM dan UB tersebut masing-masing menurun dan meningkat dari 8.754.615 dan 438.198 orang (atau

masing-masing dengan tingkat pertumbuhan secara bersamaan), UMKM mempekerjakan hampir 91 juta orang dibandingkan UB yang hanya sekitar 2,8 juta orang.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Karakteristik UMKM di Indonesia dan di negara berkembang lainya adalah biasanya kelompok industri yang sama, berlokasi berdekatan satu sama lain di suatu wilayah. Pengelompokan secara geografis menurut kelompok ini, didalam literratur industry atau UMKM, disebut klaster. Di Indonesia, banyak kegiatan UMKM, khususnya UMK, yang tersebar di daerah-daerah memang sudah berlangsung turun-temurun, dan umumnya setiap daerah memiliki spesialisasi UMKM tersendiri.

5. Kondisi UMKM di Indonesia

Simamora (2004), mengatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah tumbuh dan berkembang cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan yang cukup pesat ini berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat. Kompetisi yang meningkat cenderung menyebabkan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh UMKM mengarah pada keseimbangan. Bahkan pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak mampu berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha.

Menurut Nugroho (2003), krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu, yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi cukup besar. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap hampir seluruh lapisan golongan masyarakat dan hampir semua kegiatan perekonomian di dalam negeri, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang diakukan oleh usaha kecil dan menengah.

Berkenaan dengan perubahan yang terjadi, secara fundamental penting bagi perusahaanuntuk mengevaluasi kembali strategi dan kinerjanya disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga mampu membangun keunggulan kompetitifnya yang merupakan faktor kunci keberhasilan usaha untuk dapat mengikuti kemajuan dan perubahan persaingan yang terjadi dewasa ini.

Menurut Simamora (2004), usaha mikro kecil dan menengah sering kali dipandang sebagai sebuah problem. Terdapat berbagai alasan mengapa muncul pandangan seperti itu. Tinjauan pesrpektif kemampuan usaha mikro kecil dan menengah dianggap kurang berdaya. Sehingga pemerintah merasa perlu memberikan perhatian khusus.

Perlindungan dan bantuan usaha nampaknya menjadi suatu keharusan, mengingat jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor ini cukup besar. Panji anoraga (2002), memberi pandangan dari perspektif lain, usaha mikro kecil dan menengah justru memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan usaha besar. Hal tersebut dapat diketahui dari kemampuannya dalam melunasi kewajiban pembayaran hutang. Hasil laporan Badan Penyehatan Perbankkan Nasional (BPPN) tahun 2000 menyebutkan bahwa dari 97,6% nasabah bank pengutang adalah tergolong pengusaha kecil dan menengah. Hal ini diketahui dari besarnya nilai pinjaman yaitu rata-rata dibawah 5 miliyar. Sementara itu, sisanya adalah pengutang dari pengusaha besar.

Situmorang (2003), mengatakan bahwa kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk melakukan ekspor semakin meningkat, kendatipun krisis ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2000, transaksi ekspor komoditi industri kecil diantaranya pangan, sandang, dan

kerajinan mampu menjangkau sebesar 3,05 miliyar dollar AS, atau meningkat dari tahun sebelumnya.

B. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Manajemen

1. Proses Sistem Pengendalian Manajemen

Menurut Marciariello dan Kirby yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, Achmad Tjahjono, dan Muh. Fakhri Husein (2013:15) menyatakan bahwa proses sistem pengendalian manajemen formal meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

a. Perencanaan strategi atau pemograman

Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Keluaran dari proses perencanaan strategi berbentuk dokumen yang dinamakan strategic plan atau pemograman. Informasi tentang program meliputi beberapa tahun yang akan datang, biasanya meliputi tiga atau lima tahun.

b. Penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. Hasil dari penyusunan anggaran adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana

kegiatan yang direncanakan dalam satuan uang untuk satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Program yang telah disetujui pada tahap sebelumnya, merupakan titik awal dalam mempersiapkan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses negoisasi antara manajer pusat pertanggungjawaban dengan atasannya.

c. Pelaksanaan

Selama satu tahun anggaran manajer melakukan program bagian dari program yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan yang dibuat hendaknya menunjukkan dan menyediakan informasi tentang program dan pusat pertanggungjawaban. Laporan pusat pertanggungjawaban juga harus menunjukkan informasi untuk mengukur kinerja keuangan maupun non keuangan, informasi internal maupun informasi eksternal.

d. Evaluasi kerja

Kegiatan terakhir dari proses sistem pengendalian manajemen adalah menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Prestasi kerja pada intinya bisa dilihat dari efisien dan efektif tidaknya suatu pusat pertanggungjawabannya. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Sistem Pengendalian Manajemen yang Memadai

Suatu perusahaan dikatakan telah memiliki suatu alat kendali yang disebut dengan sistem pengendalian manajemen yang memadai, dan memadai tidaknya sistem pengendalian manajemen manakala seluruh unsur-unsur sistem pengendalian manajemen terpenuhi.

Adapun pemenuhan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, tergantung besar atau kecilnya skala perusahaan dan kemampuan seorang manajer memimpin. Memadai tidaknya sistem pengendalian manajemen dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari dipenuhi tidaknya unsur-unsur sistem pengendalian manajemen pada perusahaan tersebut.

Menurut Arief Saudi (2006:35) unsur-unsur sistem pengendalian manajemen adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Langkah awal dalam melaksanakan suatu kegiatan adalah dengan membentuk suatu organisasi yang mampu melaksanakan operasi-operasi yang selayaknya, kemudian diperlukannya pegawai-pegawai yang memenuhi syarat, lalu ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut:

1) Adanya perincian tugas
2) Adanya pendelegasian wewenang
3) Adanya evaluasi atas hasil kerja

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu pernyataan yang dimaksudkan manajemen untuk bertindak dengan cara tertentu dalam dalam keadaan tertentu pula. Agar pelaksanaan kebijakan dapat tercapai, maka diperlukan kriteria-kriteria kebijakan yang baik yaitu sebagai berikut:

1) Adanya kebijakan umum
2) Kebijakan khusus
3) Adanya pembaharuan kebijakan
4) Adanya pengkomunikasian kebijakan dengan pegawai yang berkepentingan

c. Prosedur

Prosedur adalah metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan, tujuan-tujuan pokok, rencana organisasi dan pembagian tanggung jawab operasi ditetapkan, maka perlu dikembangkan prosedur-prosedur yang tepat untuk melaksanakan operasi secara efektif, efisien, dan ekonomis.

d. Personalia

Suatu fungsi manajemen yang penting adalah membagi tugas dan kewajiban pada orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan prestasi kerja yang memuaskan. Oleh karena itu dalam mencari pegawai langkah awal yang harus diperhatikan adalah persyaratan pekerjaan yang harus dipenuhi. Kemudian mengusahakan perolehan pegawai yang memiliki kualifikasi yang sesuai atau yang bisa dilatih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut secara memuaskan. Oleh karena itu dengan memperhatikan kriteria personalia yang baik, maka dapat menjamin kelancaran aktivitas perusahaan. Kriteria personalia yang baik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya personalia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitasnya
2) Adanya program pelatihan kerja kepada para pegawai
3) Adanya pemberian tanggung jawab

e. Perencanaan

Dalam perencanaan perlu diperhatikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan, sasaran pelaksanaan dan penentuan tujuan harus dapat dicapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut diperlukan kriteria-kriteria perencanaan yang baik, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya rencana kerja dan penjabaran kegiatan
2) Adanya revisi rencana kerja jika terdapat kesalahan
3) Adanya persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap revisi rencana kerja
4) Adanya penelusuran terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

f. Pencatatan Akuntansi

Akuntansi merupakan metode pengendalian finansial yang penting terhadap kegiatan-kegiatan sumber daya yang ada. Akuntansi memberikan suatu kerangka kerja yang dapat disesuaikan untuk penetapan tanggung jawab pada bidang-bidang kegiatan tertentu dan pada waktu bersamaan memberikan dasar pelaporan sebagai sarana untuk menilai operasi. Adapun kriteria yang baik untuk pencatatan akuntansi adalah sebagai berikut:

1) Adanya pencatatan secara teliti
2) Adanya pelaporan secara tepat waktu
3) Adanya jaminan pengendalian yang cukup
4) Setelah adanya pencatatan selalu diadakan pemeriksaan fisik
5) Serta adanya dokumen pendukung

g. Pelaporan

Pelaporan dalam setiap organisasi, diperlukan untuk memberikan informasi yang mutakhir tentang perkembangan suatu peristiwa, kemajuan atau pencapaian sebagai dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Informasi seperti ini sangat penting bagi manajemen sebagai dasar untuk melaksanakan pengendalian. Sistem pelaporan ini perlu ditinjau secara periodik untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan tujuan, apakah telah dibuat laporan-laporan yang diperlukan, apakah data yang dilaporkan telah mencukupi. Sistem pelaporan yang baik dapat diketahui berdasarkan kriteria pelaporan, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya pelaporan yang memadai
2) Adanya sistem pelaporan untuk setiap departemen
3) Adanya laporan kegiatan untuk membandingkan rencana dan realisasi
4) Adanya pelaporan secara periodik
5) Adanya ketepatan waktu dalam memberikan laporan
6) Adanya pemeriksaan sebelum menerbitkan laporan yang telah disusun

h. Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern merupakan suatu mekanisme penting untuk memberikan informasi yang bebas pada manajemen

terhadap operasi, metode-metode, sistem-sistem, dan prosedur. Pihak manajemen memerlukan pengendalian intern yang bebas seperti internal auditor untuk melakukan penelitian terhadap unsur-unsur pengendalian lainnya. Bentuk internal auditor yang bebas tersebut merupakan suplemen untuk memperkuat pengendalian lainnya. Untuk menjamin adanya pengendalian dan pengawasan yang baik perusahaan perlu memperhatikan kriteria-kriteria dalam menentukan pemeriksaan intern, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya penempatan pemeriksaan intern yang tepat dalam organisasi
2) Adanya pemeriksaan intern secara mendadak
3) Adanya ruang lingkup pemeriksaan intern yang ditetapkan dengan jelas
4) Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pemeriksa intern

C. Tinjauan Tentang Sistem Informasi Manajemen

1. Sistem

Beberapa pengertian atau definisi mengenai sistem yang diberikan oleh para ahli sebagai bahan perbandingan antara lain sebagai berikut:

Menurut O'Brien dan Marakas (2009) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) Sistem adalah satu kesatuan komponen yang

saling terhubung dengan batasan yang jelas bekerja bersama-sama untuk mencapai seperangkat tujuan. Pengertian sistem menurut Kadir (2003) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Menurut Ackof (2000) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) mengatakan bahwa sistem adalah setiap kesatuan, secara konseptual atau fisik, yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lain.

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2010) sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu system pasti tersusun dari sub-sub system yang lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Dari definisi definisi di atas, terlihat bahwa masing-masing menekankan bahwa sistem memakai pendekatan pada elemen atau komponen. Artinya, bahwa sistem haruslah terdiri atas berbagai komponen/elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh.

2. Informasi

Informasi merupakan data atau fakta yang telah diproses sedemikian rupa, sehingga berubah bentuknya menjadi informasi.Di samping itu informasi dapat mengurangi ketidakpastian serta mempunyai nilai dalam keputusan karena dengan adanya

informasi kita dapat memilih tindakan tindakan dengan resiko yang paling kecil. Untuk menghasilkan kebijaksanaan dan keputusan yang baik diperlukan pengolahan data menjadi informasi yang relevan dengan masalah perusahaan yang sedang dihadapi. Dengan demikian data itu merupakan bahan mentah yang harus diproses lebih dahulu baru kemudian dapat digunakan Menurut Davis (2002) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) pengertian informasi adalah: “Data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan saat mendatang”. Sedangkan pengertian informasi menurut Mc Leod (1995) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) adalah: “Salah satu jenis utama sumber daya yang tersedia bagi manajer, yang pengelolaannya menggunakan peralatan komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dengan segera. ”Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa data adalah bahan mentah yang diproses menjadi sebuah informasi.Jadi terdapat perbedaan antara data dengan informasi di mana data adalah “bahan baku” yang harus diolah sedemikian rupa hingga berubah sifatnya menjadi informasi. Perubahan ini penting untuk disadari karena sesungguhnya data tidak mempunyai nilai apa-apa untuk mengambil keputusan, hanya informasi mempunyai nilai, dalam arti bahwa informasi akan memudahkan manajer untuk mengambil keputusan.

3. Manajemen

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya tidak akan terlepas dari yang namanya organisasi, dan di dalam organisasi itu dipelajarilah bagaimana cara mengelola organisasi dengan professional. Ini menunjukan ilmu manajemen bersifat universal. Oleh karena itu, salah satu cabang ilmu yang saat ini sangat berkembang pesat adalah ilmu manajemen. Ilmu ini telah melakukan intervensi keberbagai bidang ilmu lain, atau paling tidak telah menggandeng ilmu lain dalam pengembangannya. Kita kenal ada manajemen sumber daya manusia, manajemen perbankan, manajemen industri, manajemen keuangan, pemasaran, produksi, manajemen perkotaan, manajemen pemerintahan, manajemen pendidikan, manajemen sistem informasi, sistem informasi manajemen, sampai kepada manajemen qolbu yang dikembang-kan oleh Abdullah Gymnastiar.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2008) Manajemen adalah Suatu proses atau karangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang yang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan menurut Husaini Usman, (2006) Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengarahan dan pengendalian (P4) sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien (dalam arti luas). Menurut Terry dalam

Manullang (2005) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Dari definisi-definisi tersebut di atas, ada tiga hal penting dalam definisi definisi tersebut. Pertama, ada tujuan yang hendak dicapai; kedua, tujuan yang hendak dicapai memerlukan/membutuhkan tenaga orang lain; dan ketiga, kegiatan/aktivitas orang lain tersebut harus dibimbing dan diawasi atau dikontrol.

4. Sistem Informasi Manajemen

Menurut Raymond McLeod (1996) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) mengemukakan bahwa SIM adalah sebagai suatu sistem komputerisasi yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non manajer dalam perusahaan untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut Komaruddin dalam Effendy (1989) dalam Sri Dewi Anggadini (2012) SIM adalah pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan eksekutif bantuan infor-masi yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen.

Menurut O'Brien dan Marakas (2009) Sri Dewi Anggadini (2012) tujuan dari sistem informasi manajemen adalah: menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen meyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan; menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga tujuan tersebut.menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lain-nya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja (informasi akuntansi dibutuhkan dam dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah (2015) dengan judul "Analisis Sistem Pengendalian Manajemen untuk Peningkatan Kinerja Manajemen pada Perusahaan Keluarga UD. X Sidoarjo". Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja manajemen terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan kinerja

manajemen pada UD.X adalah gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Meskipun tidak secara langsung diketahui oleh pemilik akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja manajemen terbukti dari analisis laporan keuangan dapat dilihat bahwa perusahaan terus mengalami perkembangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Suyono (2018) dengan judul "Pentingnya Sistem Pengendalian Manajemen dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik UKM di Banyumas memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya menerapkan perencanaan strategis, pengambilan keputusan, dan evaluasi dan pengendalian untuk mengelola bisnis mereka. Namun, ada beberapa kelemahan yang dihadapi UKM untuk melakukannya seperti rendahnya pemahaman terhadap isu-isu tersebut karena rendahnya tingkat pendidikan pemilik UKM dan sumber daya yang terbatas. Menjadi penting bagi pemerintah daerah Banyumas untuk menangani isu - isu ini sehingga UKM akan berkembang dengan baik dalam mendukung perekonomian lokal.

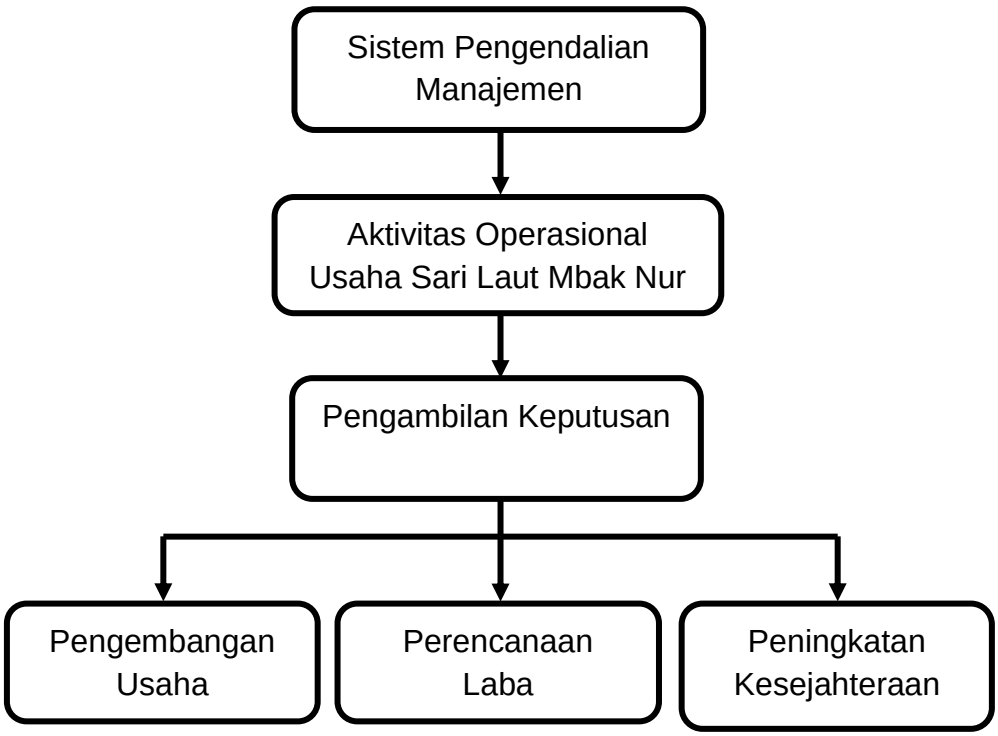
Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Rachmawati dan Shelfina (2018) dengan judul "Implementasi Sistem Pengendalian Manajemen pada UMKM Batik Lasem". Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tahapan dalam perencanaan strategis belum dilakukan secara optimal karena pemilik menilai usaha batik tulis masih tergolong usaha kecil. Fase-fase dalam penyusunan anggaran belum dilakukan secara keseluruhan, pemilik hanya melakukan penyusunan anggaran secara sederhana. Ukuran kinerja juga belum dilakukan secara keseluruhan, kedua perusahaan tidak melakukan evaluasi mengenai retensi karya-wan karena karyawan yang keluar masuk akibat membandingkan gaji merupakan hal yang wajar dalam usaha batik.

E. Kerangka Konseptual

Sebagai bahan mempermudah analisis maka berikut penulis sajikan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Berdasarkan rancangan penelitian maka lokasi penelitian dilaksanakan di warung Sari Laut Mbak Nur yang berlokasi di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan 3 bulan dari bulan Februari sampai dengan April2021.

B. Informan Penelitian

Informan yang akan menjadi narasumber dalam proses penelitian sebanyak 5 informan yaitu karyawan sekaligus pemilik usaha warung makan Sari Laut Mbak Nur yang berlokasi di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

C. Definisi Operasional Variabel

1. UMKM adalah jenis usaha yang berskala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kriteria berdasarkan undang-undang tentang UMKM.
2. Sistem pengendalian manajemen adalah sebagai suatu proses untuk memotivasi dan memberikan inspirasi kepada orang-orang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan aktivitas didalam

organisasi tersebut yang akan mendorong kepada pencapaian tujuan organisasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya serta memperoleh data dan keterangan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek dan subjek penelitian untuk memeperoleh keterangan yang akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi dengan melakukan Tanya jawab kepada informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
3. Teknik dokumentasi adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, berupa data-data primer terkait dengan referensi, buku-buku, serta sumber bacaan lainnya.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Jenis Data

   Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata-kata atau kalimat.

2. Sumber Data

   a. Person adalah orang yang berwewenang dalam memberikan data yang di butuhkan sesuai dengan pokok pembahasan.

   b. *Place* (tempat) adalah data yang diperoleh dari suatu tempat penelitian, dalam hal ini yaitu warung Sari Laut Mbak Nur.

   c. *Paper* (dokumen) adalah dokumen terkait tentang sistem pengelolaan manajemen pada warung Sari Laut Mbak Nur

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan dari beberapa sumber yang berguna bagi peneliti. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan gambar, foto atau dokumen berupa laporan (Moh. Kasiram, 2010).

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.Sehingga data yang teah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2012).

2. Penyajian Data

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan. Dengan mendisiplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi akan merencanakan kerja sebelumnya (Sugiyono, 2012).

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kota Parepare

Diawal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini, yang disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring tempat tumbuhnya semak-semak tersebut secara liar dan tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena hobbynya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “Baik dibuat pelabuhan Kawasan ini”. Sejak itulah melekat nama “Parepare” Kota Pelabuhan.

Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa. Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman Hindia Belanda, di Kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai Pimpinan Pemerintah (Hindia Belanda), dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi, Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Onder Afdeling Parepare.

Pada setiap wilayah/Onder Afdeling berkedudukan Controlur atau Gezag Hebber. Disamping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, struktur Pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah raja-raja bugis, yaitu Arung Barru di Barru, Addatuang Sidenreng di Sidenreng Rappang, Arung Enrekang di Enrekang, Addatung Sawitto di Pinrang, sedangkan di Parepare berkedudukan Arung Mallusetasi.

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya Pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di Daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 Daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedang Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Walikotamadya Pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari

1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Adapun pejabat-pejabat Walikota sejak terbentuknya Kota Praja hingga Kota Parepare sekarang ini adalah sebagai berikut:

a.	H. Andi Mannaungi	Walikota/KDH (1960 -1965)
b.	Andi Mappangara	Walikota/KDH (1965 - 1968)
c.	H. Andi Makkoelaoe	Pgs. Walikota/KDH (1968 - 1969
d.	Drs. A. Mallarangeng	Walikota KDH (1969 - 1972)
e.	Abdullah Adjaib	Walikotamadya/KDH (1972 - 1973)
f.	Drs. H. M. Parawasa	Walikotamadya/KDH (1973 - 1977)
g.	Drs. H. M. Joesoep Madjid	Walikotamadya/KDH (1977 - 1983)
h.	Drs. H. A. Samad Thahir	Walikotamadya/KDH (1983 - 1988)
i.	H. Mirdin Kasim, SH., M.Si	Walikotamadya/KDH (1988 - 1993)
j.	Drs. H. Syamsul Alam Bulu	Walikotamadya/KDH (1993 - 1998)
k.	H. Basrah Hafid, SH., MM	Walikota (1998 - 2003)
l.	Drs. H.M. Zain Katoe	Walikota (2003 - 2008)

m.	Drs. H. A. Sulham Hasan, M.Si	Pejabat Walikota (2008 - 2008)
n.	Drs. H. M. Zain Katoe	Walikota (2008 - 2010)
o.	H. Sjamsu Alam	Plt. Walikota (2010 - 2012)
p.	H. Sjamsu Alam	Walikota (2013)
q.	H. M. Taufan Pawe, SH., MH	Walikota - Sekarang)

B. Kondisi Geografis Kota Parepare

Secara adminitrasi wilayah Kota Parepare memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru, Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Wilayah administrasi Kota Parepare hingga tahun 2008 terdiri atas 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Luas wilayah dari masing-masing kecamatan Kota Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 66,70 Km2, atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 8,33 Km2 atau sekitar 8,38 % dari luas Kota Parepare. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan

Februari. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah yakni 1 jam lebih cepat dari waktu ibukota negara Jakarta dan 8 jam lebih cepat dari Greenwich Meridian Time (GMT).

C. Kependudukan Kota Parepare

Jumlah penduduk kota Parepare Tahun 2017 berjumlah 142.097 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.464 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 43.480 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 34.586 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 18.567 jiwa. Jumlah penduduk di kecamatan Bacukiki merupakan jumlah penduduk yang terendah jika dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya di Kota Parepare.

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Parepare yaitu sebesar 97. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dimana dari 100 wanita hanya terdapat 97 laki-laki; dengan rincian terdapat 69.822 jiwa penduduk laki-laki dan 72.275 jiwa penduduk perempuan.

Penduduk Usia Kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas) yang ada di Kota Parepare berjumlah 102.183 orang yang terdiri dari 68.102 orang Angkatan Kerja dan 34.081 orang Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja

yang sudah bekerja ada sebanyak 63.693 orang atau sebesar 93,53 persen, sedangkan sisanya yaitu 4.409 orang masih menganggur atau sebesar 6,47 persen.

Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kota Parepare tahun 2017 adalah sebesar 66,65 persen, ini berarti bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Parepare ada sebanyak 66,65 persen pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (penduduk produktif). Indikator lainnya yang sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Kota Parepare tahun 2017 sebesar 6,47 persen, ini berarti bahwa ada sebanyak 6,47 persen penduduk usia kerja yang masih menganggur.

Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga/ melakukan kegiatan lainnya. Mayoritas pencari kerja yang terdaftar dan yang telah ditempatkan oleh Disnaker, Dinas Ke-pendudukan, dan Catatan Sipil adalah laki-laki dengan rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA/sederajat.

Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kota Parepare bekerja disektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebanyak 25.610 orang atau sekitar 40,21 persen. Sektor kedua yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup

besar adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 16.496 orang atau sekitar 25,90 persen dari total angkatan kerja yang bekerja.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menganalisis dan menjelaskan pentingnya penerapan sistem pengendalian manajemen pada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare. Penguumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan sehhingga diperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan sistem pengendalian manajemen pada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare.

Informan dalam penelitian ini adalah Nur Lia selaku pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur dengan karyawan yang berjumlah 3 orang. Pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan berkaitan seputar aktivitas pengendalian manajemen uusaha Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare.

1. Pendapatan 3 tahun terakhir

   Pendapatan merupakan hasil dari jumlah total penerimaan penjualan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas usaha. Informasi yang diperoleh pada saat melakukan pengumpulan data terkait dengan pendapatan usaha Sari Laut Mbak Nur dalam tiga tahun terakhir dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Pendapatan Usaha Sari Laut Mbak Nur

Tahun	Rata-rata Pendapatan Bulanan (Rp)	Rata-rata Pendapatan Tahunan (Rp)
2018	13,500,000	162,000,000
2019	7,500,000	90,000,000
2020	10,500,000	126,000,000

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dijelaskan rata-rata pendapatan yang diperoleh Sari Laut Mbak Nur dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2018 jumlah pendapatan dalam satu tahun sebesar Rp162,000,000 kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 menjadi Rp90,000,000 begitupun pada tahun 2020 pendapatan yang diperoleh belum mampu melebii dari pendapatan pada tahun 2018.

Faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan diakibatkan karena adanya pandemic sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi pergerakan dan perkumpulan masyarakat. Hal tersebut berdampak langsung pada usaha Sari Laut Mbak Nur karena sejak terjadi pandemic jumlah pengunjung Sari Laut Mbak Nur juga ikut mengalami penurunan yang signifikan dibanding kondisi penjualan sebelum pandemi.

2. Analisis Pengelolaan Usaha

a. Sistem Perencanaan Penjualan

Sistem perencanaan penjualan yang diterapkan pada Sari Laut Mbak Nur masih menggunakan metode yang sederhana dalam artian Sari Laut Mbak Nur belum menetapkan jumlah dalam membuat sistem perencanaan penjualan. Sari Laut Mbak Nur tidak mempunyai catatan khusus yang memuat tentang berapa penjualan yang harus direalisasikan dalam setiap ari, bulanan bahkan tahunan.

Pengelolaan penjualan pada Sari Laut Mbak Nur hanya didasarkan pada perhitungan setelah melakukan aktivitas usaha, pemilik usaa baru melakukan perhitungan berapa penjualan yang diperoleh setelah selesai melakukan penjualan tersebut. hal tersebut berarti bawa Sari Laut Mbak Nur tidak menerapkan sistem perencanaan penjualan yang terstruktur.

b. Mekanismen Penjualan dalam Pemisahan Modal dan Laba

Pemisahan modal dan laba pada pengelolaan usaha Sari Laut Mbak Nur dilaksanakan secara sederhana dengan cara seluruh hasil penjulana dikumpulkan kemudian disisihkan untuk membeli bahan baku usaha. Sisa dari hasil pembelian bahan baku usaha dianggap sebagai laba yang kemudian dimasukkan dalam rekening pribadi pemilik usaha Sari Laut Mbak Nur.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pemisahan modal dan laba pada pengelolaan usaha Sari Laut Mbak Nur belum dilaksanakan secara rapid an struktur melainkan dilakukan berdasarkan prinsip yang sederhana.

c. Permasalahan dalam Pengelolaan Usaha

Permaslahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan usaha Sari Laut Mbak Nur yaitu sulitnya mengetahui perubahan jumlah pengunjunga yang diperoleh setiap harinya karena tidak terdapat data yang mendukung sehingga pemilik usaha tidak memiliki cukup informasi dalam proses pengambilan keputusan.

3. Perencanaan Strategis

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan bekaitan dengan perenanaan strategis dalam hal pengawasan kegiatan usaha sehari-hari, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan usaha Sari Laut ini saya tidak memiliki cara-cara khusus untuk melakukan pengawasan kepada para pekerja saya, pengawasan yang saya lakukan berjalan dengan apa adanya maksudnya bahwa ketika ada terjadi kesalahan maka pada saat itu juga saya selaku pemilik warung meluruskannya atau melakukan perbaikan kepada karyawan karena dalam

aktivitas seari-hari saya juga ikut terlibat dalam proses pekerjaan usaha". (Hasil wawancara)

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban yang diberikan oleh karyawan ibu Nur Lia yang menyatakan bahwa:

"Untuk pengawasannya itu seperti biasa saja artinya ibu Nur sambil bekerja juga sambil mengawasi juga para karyawannya, jadi tidak dilakukan pengawasan yang secara khusus namun berjalan seperti biasa, nanti pada saat terjadi kesalahan dan semacamnya baru dilakukan perbaikan dan koreksi oleh ibu Nur selaku pemilik usaha". (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan informan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa perencanaan stategis dalam hal pengawasan kegiatan usahha sehari-hari pada UMKM Mbak Nur di Kota Parepare penerapannya masih rendah sebab dalam aktivitas usaha sehari-hari tidak ada pengawasan yang secara khusus dilakukan oleh pemilik ataupun karyawan. Pengawasan yang dilakukan pemilik usaha merupakan pengawasan yang seadanya tanpa adanya upaya secara khusus memantau aktivitas usaha sehari-hari yang berpotensi merugikan usaha.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan perenanaan strategis dalam hal pengarahan kepada karyawan, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Saya memberikan pengarahan dan motivasi kepada para karyawan supaya semua karyawan saya bisa bekerja dengan semangat karena dengan semangat kerja yang bagus maka karyawan pastinya bekerja dengan giat melayani seluruh pelanggan dan mempersiapkan makanan dengan baik”. (Hasil wawancara)

Hal tersebut didukung oleh jawaban yang diberikan oleh salah satu karyawan yang menyatakan bahwa

“Ibu Nur selalu memberikan arahan kepada semua karyawannya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan misalnya melayani pelanggan dengan cepat, menghargai semua pelanggan dan senantiasa bersikap sopan kepada semuua pelanggan, ibu Nur juga selalu memotivasi karyawannya agar bekerja dengan semangat demi hasil yang memuaskan”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan responden maka dapat dijelaskan bahwa aspek motivasi dan pengarahan dalam sistem pengendalian manajemen pada Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare telah diterapkan dengan baik. Hal tersebut tergambar dari jawaban para informan dan pengamatan peneliti selama melakukan observasi di Sari Laut Mbak Nur. Ibu Nur Lia selaku pemilik usaha secara rutin selalu memberikan arahan kepada karyawannya untuk bekerja dengan baik sehingga hasil kegiatan pada umumnya selalu memuaskan dari sisi penjualan.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan perenanaan strategis dalam hal pendelegasian tugas kepada karyawan, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Iya, saya sudah mendelegasikan tugas kepada masing-masing karyawan saya, pada awalnya saya yang melakukan semua seperti menyiapkan pesanan pelanggan, menerima pembayaran pelanggan dan lain-lain namun pada saat saya sudah mempunyai karyawan maka tugas-tugas itu saya delegasikan kepada karyawan-karyawan saya untuk memudahkan tugas dan supaya lebih efektif pekerjaan ini”. (Hasil wawancara)

Hal tersebut juga ditegaskan oleh karyawan yang menyatakan bahwa:

“Saya diberikan tugas oleh ibu Nur untuk menyiapkan pesanan pelanggan misalnya menggoreng ikan, menyiapkan nasi, sayur dan sambal, sementara karyawan yang lain ada yang diberi tugas menyuci piring dan menerima pembayaran dari pelanggan”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan informan dalam penelitian maka dapat dijelaskan bahwa pendelegasian tugas telah dilakukan dengan baik pada UMKM Sari Laut Mbak Nur, pemilik usaha membagi tugas kepada masing-masing karyawan agar aktivitas usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan perenanaan strategis dalam hal pemecahan masalah, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Saya selaku pemilik usaha dalam menangani masalah yang terjadi pada karyawan maka biasanya saya menengahi permasalahan itu dengan memanggil karyawan yang berselisih itu agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan supaya tidak mengganggu pekerjaan masing-masing yang bisa merugikan kita semua, namun alhmadulillah perselisihan sangat jarang terjadi bisa dibilang cuma 1 atau 2 kali selama usaha ini berdiri”. (Hasil wawancara)

Jawaban dari pemilik usaha tersebut dibenarkan oleh karyawan yang menyatakan bahwa:

“Iya betul memang ibu Nur pernah menengahi perselisihan yang terjadi antar karyawan ,perselisihan terjadi karena saling salah paham namun ibu Nur cepat pertemukan karyawan yang berselisih itu supaya bisa berdamai jadi tidak sampai lama dan mengganggu pekerjaan kita”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan maka dapat dijelaskan bahwa sebagai bagian dari pengendalian manajemen maka ibu Nur selaku pemilik usaha bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul diantara karyawan

sehingga permasalahan yang ada tidak sampai berdampak mengganggu pekerjaan aktivitas usaha.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan perenanaan strategis dalam hal perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Untuk perencanaan dalam usaha saya tidak memiliki perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, perencanaan yang saya buat hanya terbatas untuk merencanakan hasil penjualan dalam satu bulannya, perkiraan penjualan itu saya perkirakan berdasarkan hasil penjualan bulan-bulan sebelumnya”. (Hasil wawancara)

Sementara itu karyawan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur menyatakan bahwa:

“Untuk perencanaan saya kurang paham karena karyawan tidak diberitahuu soal perencanaan-perencanaan dalam usaha ini, mungkin perencanaan hanya ibu Nur yang buat”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan informan maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian manajemen dalam hal perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang belum maksimal diterapkan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur Parepare. Hal tersebut diketahui dari informasi pemilik usaha bahwa

perencanaannya hanya terbatas pada penjualan setiap bulannya serta karyawan menyatakan tidak memahami soal perencanaan usaha.

4. Pengambilan Keputusan

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam hal pemilik usaha melibatkan seluruh karyawan dalam pengambilan keputusan, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Saya selaku pemilik usaha selama ini jika ingin mengambil keputusan yang hubungannya dengan usaha ini tidak meminta pendapat dari para karyawan, saya mengambil keputusan secara mandiri karena dengan pengalaman yang saya miliki saya anggap bisa ambil keputusan yang baik untuk usaha yang saya rintis ini, saya juga menganggap bahwa karyawan tugasnya hanya bekerja dan saya yang ambil keputusan”. (Hasil wawancara)

Jawaban yang diberikan oleh ibu Nur selaku pemilik usaha dipertegas oleh karyawan yang menyatakan bahwa:

“Saya belum pernah dimintai pendapat oleh ibu Nur pada saat ambil keputusan atau kebijakan untuk Sari Laut Mbak Nur, keputusan semuanya ada pada ibu Nur dan kami semua karyawan hanya mengikuti”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para informan maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian manajemen dalam hal proses pengambilan keputusan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur belum diterapkan, hal tersebut dikarenakan dalam pengambilan keputusan pemilik usaha tidak melibatkan karyawan melainkan mengambil keputusan secara mandiri dengan pertimbangan yang dibuatnya sendiri.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam hal pertimbangan data historis, asumsi dan tren secara akurat, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Ketika saya ingin mengambil keputusan maka saya melakukan pertimbangan menggunakan pengalaman yang pernah saya lalui dan perkiraan kedepannya, misalnya ketika saya ingin menambah juumlah karyawan maka yang menjadi pertimbangan saya adalah perkiraan masa depan yang terjadi peningkatan jumlah pelanggan sehingga saya sulit jika menanganinya sendiri”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan informan dalam penelitian ini maka dapat dijelaskan bahwa dalam proses pengambilan pemilik usaha menjadikan pengalaman dan perasaan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang sebagai bahan pertimbangan. Jadi proses pengambilan

keputusan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare tidak didasari pada pertimbangan data historis dan tren secara akurat melainkan hanya didasari oleh asumsi pemilik usaha.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam hal pertimbangan hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Ketika saya ingin mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan usaha maka tentunya saya mempertimbangkan hasil yang akan saya dapatkan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang karena semua keputusan yang saya ambil pastinya saya berharap akan membuahkan hasil yang positif untuk usaha saya”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh informasi yang dapat dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan pemilik usahha UMKM Sari Laut Mbak Nur menjadikan hasil jangka pendek dan jangka panjang sebagai salah satu pertimbangan dengan alasan setiap keputusan yang diambil diharapkan memberikan hasil yang positif untuk usaha.

5. Evaluasi dan Pengendalian

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan evaluasi dan pengendalian dalam hal membandingkan

kinerja dengan standar, jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

“Standar yang digunakan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur untuk menilai apakah kinerja kita sudah bagus atau kurang itu dari hasil penjualan setiap bulannya, jadi standar yang digunakan penjualan bulan lalu, kalau penjualan kita meningkat dan untung maka kita katakana kinerja kita bagus tapi kalau hasil penjualan menurun dan rugi berarti kinerja kita jelek.” (Hasil wawancara)

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan karyawan yang menyatakan bahwa:

“Standar kerja disini cuma hasil penjualan atau kepuasannya nasabah, maksudnya kalau penjualan banyak dan nasabah puas untuk menjadi pelanggan disini maka kinerja kita bisa dibilang bagus”. (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para informan maka dapat dijelaskan bahwa UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare belum memiliki standar kinerja secara akurat, standar yang digunakan untuk menilai kinerja terbatas hanya pada untung rugi dan perbandingan penjualan pada bulan lalu.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan berkaitan dengan evaluasi dan pengendalian dalam hal upaya yang dilakukan untuk mencari penyebab kinerja tidak sesuai harapan,

jawaban yang diberikan informan dalam penelitian menyatakan bahwa:

"Ketika hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan harapan sebagai contoh kalau kita rugi dalam satu bulan atau penjualan kita menurun maka saya selaku pemilik usaha mencari tahuu dan menganalisa berdasarkan pengalaman yang saya miliki kira-kira apa yang menyebabkan kita rugi atau penjualan kita menurun, itu dilakukan untuk dijadikan pelajaran kedepannya sehingga rugi yang terjadi tidak berlanjut ke bulan depan". (Hasil wawancara)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan dalam penelitian ini maka dapat dijelaskan bahwa pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare sebagai pengendalian manajemen selalu berupaya melakukan evaluasi ketika kinerjja tidak sesuai dengan harapan. Evaluasi yang dilakukan dengan mencari tahu penyebab kerugian atau penurunan penjualan kemudian diperbaiki sehingga tidak terulang pada bulan berikutnya.

B. Pembahasan

Sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan yang tujuannya untuk membantu manajemen suatu organisasi agar mampu mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mengarahkan seluruh

sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan bersama.

UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan badan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga, individu atau entitas bisnis dengan skala kecil, UMKM merupakan salah satu penyokong perekonomian secara nasional maupun secara regional. Salah satu UMKM yang ada di Kota Parepare adalah Sari Laut Mbak Nur yang beroperasi dengan mengandalkan sistem pengelolaan manajemen dengan skala kecil.

Sistem pengendalian manajemen merupakan alat yang digunakan oleh manajemen untuk dapat mengarahkan sumber daya manusia agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sistem pengendalian manajemen secara umum memiliki tiga indikator yaitu perencanaan strategis, pengambilan keputusan serta evaluasi dan pengendalian.

Adapun indikator dalam sistem pengendalian manajemen antara lain adalah 1) perencanaan strategis 2) pengembilan keputusan 3) evaluasi dan pengendalian.

1. Perencanaan Strategis

   Perencanaan strategis yang diterapkan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare memiliki beberapa indikator antara lain pengawasan kegiatan usaha sehari-hari, pengarahan kepada karyawan, pendelegasian tugas kepada karyawan dan

pemecahan masalah serta perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Pengawasan kegiatan bisnis harian pada UMKM Sari Laut Mbak Nur dilaksanakan secara sederhana serta dapat dikatakan tidak ada pengawasan yang dilakukan secara trstruktur dan terencana. Namun hal tersebut teradi karena pemilik usaha juga menjadi bagian karyawan yang melaksanakan aktivitas bisnis sehari-hari jadi sulit untuk melakukan pengawasan yang trstruktur.

Pengawasan yang minim akan menyebabkan potensi kesalahan dalam aktivitas bisnis menjadi besar sehingga walaupun suatu entitas bisnis berukuran kecil namun tetap diperlukan suatu pengawasan agar seluruh sumber daya yang bekerja sejalan dengan tujuan organisasi.

Pengendalian manajemen dalam hal pengarahan kepada karyawan telah berjalan dengan baik pada UMKM Sari Laut Mbak Nur. Pengarahan dilakukan oleh pemilik usaha kepada seluruh karyawan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh karyawan memahami tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Proses pengamatan yang penulis lakukan pada saat penelitian menunjukkan bahwa proses pengarahan yang diberikan kepada karyawan dilakukan hampir setiap hari oleh pemilik usaha. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar seluruh sumber daya

berada pada jalan yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas.

UMKM Sari Laut Mbak Nur telah menerapkan salah satu prinsip pengendalian manajemen yaitu pendelegasian tugas kepada karyawan. Berdasarkan analisis wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur telah melakukan pendelegasian tugas kepada seluruh karyawannya.

Masing-masing karyawan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur memiliki tugasnya masing-masing sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien karena pendelegasian tugas yang telah dilaksanakan secara baik.

Pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur telah menjalankan salah satu bagian dari perencanaan strategis pada pengendalian manajemen yaitu pemecahan masalah. Pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur memiliki peran untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi bisnis yang dipimpinnya.

Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang sebagai bagian dari perencanaan strategis belum dilaksanakan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya tujuan secara kuantitatif dalam jangka panjang sebab pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur hanya melakukan perencanaan jangka pendek setiap bulannya.

Hal tersebut sejalan dengan jurnal penelitian oleh Aditya Prasetyo (2017) yang menyajikan dalam hasil penelitiannya bahwa dalam aktivitas operasional sebagai sistem pengendalian manajemen PT. Bintang Jaya menerapkan perencanaan strategi dengan menentukan program-program yang ingin dijalankan serta alokasi sumber daya untuk menjalankan program tersebut.

2. Pengambilan Keputusan

Salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen adalah pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan pada UMKM Sari Laut Mbak Nur masih kurang baik jika ditinjau dari sisi pengendalian manajemen. Hal tersebut dikarenakan pada saat proses pengambilan keputusan pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur tidak melibatkan karyawan sehingga keputusan yang diambil hanya berdasarkan pertimbangan pribadi tanpa meminta pendapat dari para karyawan.

Pengambilan keputusan sebaiknya melibatkan seluruh karyawan sehingga memperkaya pertimbangan sebelum proses pengambilan keputusan ditetapkan. Semakin banyak pendapat yang dikeluarkan tentunya memberikan berbagai pilihan kepada pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur untuk memutuskan kebijakan yang ditetapkan.

Pertimbangan pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur dalam pengambilan keputusan didasarkan pada pengalaman dan asumsi

tanpa didasarkan pada data historis dan tren secara akurat. Hal tersebut tentunya menyebabkan potensi kebijakan yang diputuskan tidak akurat karena dasar pertimbangan yang tidak kuat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam proses pengambilan keputusan pemilik UMKM Sari Laut Mbak Nur mempertimbangkan capaian yang mungkin dihhasilkan dari keputusan tersebut, capaian yang dipertimbangkan baik jangka pendek maupun capaian yang bersifat jangka panjang.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anita Puspitasari (2019) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa dalam pengambilan keputusan manajemen PT. PLN (Persero) didasarkan pada data-data yang tersedia dari sistem informasi akuntansi.

3. Evaluasi dan Pengendalian

Proses evaluasi dan pengendalian sebagai bagian dari pengendalian manajemen pada UMKM Sari Laut Mbak Nur belum sepenunya diterapkan. UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare belum memiliki standar kinerja secara akurat, standar yang digunakan untuk menilai kinerja terbatas hanya pada untung rugi dan perbandingan penjualan pada bulan lalu.

UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare sebagai pengendalian manajemen selalu berupaya melakukan evaluasi ketika kinerjja tidak sesuai dengan harapan. Evaluasi yang dilakukan dengan mencari tahu penyebab kerugian atau penurunan penjualan kemudian diperbaiki sehingga tidak terulang pada bulan berikutnya.

Evaluasi dan pengendalian dibutuhkan untuk menilai apakah strategi dan pelaksanaannya dilapangan sudah berjalan sesuai dengan harapan atau bahkan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Peran evaluasi dan pengendalian yaitu ketika pencapaian tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan perbaikan-perbaikan atas penyebab ketidak sesuain antara apa yang diharapkan dengan apa yang terealisasi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afdal Dinan (2018) yang mengungkapkan bawa evaluasi dan pengendalian pada PT. Mandala Finance dilakukan dengan meninjau kembali capaian yang telah direalisasikan pada periode sebelumnya kemudian dilakukan evaluasi apa saja yang dapat terealisasi dan tidak terealisasi kemudian mencari solusi untuk periode selanjutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare tidak menerapkan sistem pengendalian manajemen yang baik karena dalam UMKM SARI LAUT MBAK NUR pendapatannya masih minim dan masih menggunakan sistem kekeluargaan karna masih kurang mempercayai orang luar untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam UMKM SARI LAUT MBAK NUR, dengan tiga indikatornya yaitu perencanaan strategis, pengambilan keputusan serta evaluasi dan pengendalian. Perencanaan strategis berkaitan dengan pengawasan kegiatan usaha sehari-hari, pengarahan kepada karyawan, pendelegasian tugas kepada karyawan dan pemecahan masalah serta perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pengambilan keputusan berkaitan dengan proses dalam pengambilan keputusan yang tidak melibatkan karyawan. Evaluasi dan pengendalian merupakan penerapan standar dalam menilai kinerja karyawan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini maka penulis berharap kepada UMKM Sari Laut Mbak Nur di Kota Parepare agar menyempurnakan penerapan sistem pengendalian manajemen dengan indikator perencanaan strategis, pengambilan keputusan serta

evaluasi dan pengendalian agar pengelolaan usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A.B Susanto. 2001. *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Buku II. Jakarta: Salemba Empat

Amir, M. Taufiq. 2005. Dinamika Pemasaran: Jelajahi & Rasakan. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Abdullah, Maskur. 2005. *Lilitan Masalah Usaha Mikro kecil, Menengah (UMKM) dan Kontroversi Kebijakan*. Medan: Bitra Indonesia.

Anoraga, Panji. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asep ST. Sujana. 2005. *Manajemen Ritel Moderen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ahimsa Putra, 2003, *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik, Esei-esei Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta Kepel press.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Fandy Tjiptono. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hendri, Ma'ruf, 2006, *Pemasaran Ritel,* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kuncoro, Mudrajad, 2008, "Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional", Yogyakarta

Kotler, Philip, 2000, Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium, Jilid II, EdisiKesepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Machfoedz, Mahmud. Pengantar Pemasaran Modern. Jogjakarta:AMP YKPN, 2005.

Mangkunegara, Dr. A.A. Anwar Prabu. 2002. Perilaku Konsumen. Bandung: PT. Refika Aditama.

Muhammad Idham, 2015, “Skripsi: Pengaruh Toko Modern Terhadap Keseimbangan Usaha Kecil Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap”, Universitas Muhammadiyah Parepare.

Malano, H., 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moh. Nazir, 2005, “*Metode Penelitian*”, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Saputro, Adi. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Saladin, Djaslim, 2006, Manajemen Pemasaran, Edisi Keempat, Bandung: Linda Karya

Setiadi, Nugroho. 2003. Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran. Jakarta: Prenada Media.

Simamora, Bilson, 2004, Riset Pemasaran, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Smeru, 2007. “*Pasar Tradisional di Era Persaingan Global”*. Jakarta.

Sukaesih, H. 2004. “Pasar Swalayan dan Prospeknya”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 2: 63-68.

Sugiyono. 2011. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”,* AFABETA, Bandung.

Situmorang, Lusia dkk. 2003. *Usaha Kecil Menengah dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sinaga Pariaman. 2004. *Pasar Modern VS Pasar Tradisional*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Soeharno. 2006. *Teori Mikro Ekonomi.* Yogyakarta: Andi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah